

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan antar sektor publik dengan privat dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebuah negara dapat dikatakan maju dan berkembang dapat dilihat dari pemerintahannya. Pemerintah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Pemerintahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam terciptanya sebuah negara, pemerintah dibutuhkan dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pembangunan, social, hukum, maupun segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan hidup orang banyak yang berada dalam lingkup Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, atau bahkan desa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan (*Good Governance*) perlu adanya gerakan perubahan yang disusun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Salah satu strategi baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini yaitu *Collaborative Governance* (Sedarmayanti,2012). Perkembangan lingkungan yang semakin menglobal saat ini menuntut adanya peran pemerintah dalam mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi. Maka dari itu, *Collaborative Governance* atau kolaborasi hadir sebagai suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dalam penanganan masalah publik (Thomson&Perry,2018). Kerjasama yang dimaksud antara pemangku kepentingan adalah melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat (Irawan,2017).

Konsep *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tatanan pemerintahan yang melibatkan beberapa *stakeholders* atau pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang dirumuskan dalam sebuah forum (Ansell dan Gashl, 2007). Adapun fokus dari *collaborative governance* yaitu pada kebijakan dan masalah publik. Lembaga publik berorientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi

dalam bentuk mencapai derajat kesepakatan antara *stakeholder*. Maka dari itu, *collaborative governance* menginginkan terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Karena kebutuhan kolaborasi ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat dan keterbatasan dalam menjangkau system antara pihak yang terjalin dengan *stakeholder* yang terlibat (Mutiarawati, 2017).

Collaborative governance adalah salah satu konsep yang tepat dalam membangun pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pada hakekatnya konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk memperoleh dan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat yang lemah agar dapat mengidentifikasi, menetapkan, menganalisis kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi, sekaligus memilih alternatif solusinya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Warih, 2017).

Bagi Negara Republik Indonesia, pemberdayaan dilaksanakan dalam memenuhi tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan dari pembukaan Undang-Undang artinya bahwa keadilan sosial akan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih luas serta persamaan dan sosial melalui cara saling membantu dan belajar mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne, 1997:268).

Kegiatan pemberdayaan menjadi suatu langkah awal yang baik dalam membangun strategi, dengan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan masyarakat yang mengalami kehidupan yang belum mencukupi. Tujuan pemberdayaan penting dilakukan sebagai bentuk inovasi untuk melakukan gerakan sebuah perubahan. Menurut (Sulistiyani,2004) Pemberdayaan masyarakat terpusat pada keikutsertaan dan partisipasi serta kompetensi masyarakat lokal

dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan ide kreatif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri.

Secara geografis Desa Segarajaya termasuk Desa bagian pesisir pantai. Dimana masyarakat yang tinggal dipesisir memiliki keterbatasan, Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa persoalan masyarakat ekstrem di wilayah pesisir relatif kompleks karena kelompok masyarakat miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki karakteristik, yaitu seperti pada aspek demografi dimana anggota rumah tangga lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, kemudian aspek pendidikan yang rendah dimana kepala rumah tangga miskin di wilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD (Kominfo, 2021).

Hal ini juga didukung Sebagaimana dari Keputusan Mendes Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menyebutkan bahwa Desa Segara Jaya merupakan salah satu desa yang tertinggal. Faktor yang menyebabkan ketertinggalan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor social sosial yang identik dengan masyarakat pesisir, kemudian kemiskinan pada penduduk pesisir seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir, serta adanya keterbatasan modal dan teknologi. Permasalahan pada desa wilayah pesisir memang sangat kompleks. Oleh sebab itu, salah satu Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Segarajaya dijalankan melalui pemberdayaan perempuan.

Berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, peran Perempuan mempunyai potensi untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia kedepan. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kelompok perempuan dalam meningkatkan kemampuan keterampilan atau kekuatan yang dimiliki perempuan agar dapat menjadi perempuan yang mandiri dengan memberikan dukungan motivasi melalui kegiatan pelatihan serta bantuan penguatan modal usaha untuk meningkatkan produktivitas perempuan (Muhamad,2022). Keterbatasan kemampuan perempuan terutama yang tinggal di Desa bagian pesisir disebabkan karena kurangnya kemampuan perempuan dalam

pendidikan, sosial dan ekonomi. Sehingga upaya pemberdayaan perempuan desa sangat dibutuhkan sebagaimana dengan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemanfaatan potensi Desa Segarajaya yang dikemas dalam pemberdayaan perempuan sebagai bentuk peningkatan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan potensi budaya lokal, karena Desa Segarajaya memiliki produk unggulan dibidang kebudayaan yaitu pada kerajinan batik. Kerajinan batik ini dikenal dengan sebutan batik seraci atau batik betawi. Batik sendiri merupakan salah satu warisan khas nusantara. Keunikan dari batik seraci sendiri yaitu dengan memadukan dua budaya yaitu budaya sunda dan budaya betawi. Pengrajin Batik Betawi tersebar di beberapa daerah Jabodetabek yaitu (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi). Seni kerajinan Kelompok Batik seraci termasuk industri rumah tangga atau industri kecil, dengan memiliki ciri khas motif unggulan yang menyesuaikan dengan kebudayaan Betawi dan kegiatan sehari-hari masyarakat seperti motif membajak sawah, budidaya ikan lele, hingga bermotifkan tugu monas, ondel-ondel dan lain sebagainya.

Awal mula Kelompok batik seraci betawi didirikan oleh seorang perempuan yang bernama Ernawati. Ia merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki cita-cita untuk mengembangkan Batik Betawi yang telah lama tenggelam, keinginan beliau membentuk kerajinan batik seraci ini bertujuan untuk melestarikan batik betawi yang kini mulai tergeser keberadaanya dan membantu meningkatkan perekonomian pada ibu rumah tangga. Dimana kondisi pekerjaan kepala rumah tangga yang bertempat tinggal di sekitar rumah produksi batik seraci pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Permasalahan pada pendapatan nelayan di desa Segarajaya secara nyata akan dipengaruhi oleh modal usaha, sementara pendapatan ikan tidak hanya dipengaruhi modal usaha saja, pengaruh cuaca yang tidak bagus pun akan mempengaruhi hasil tangkapan yang tidak menentu dan apalagi ketika air laut sedang surut (Ismail, 1997). Kondisi ini

akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan, hal ini tentu akan berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga nelayan. Sedangkan jika pendapatan yang dimiliki oleh petani bisa dibilang tidak tentu, karena maksimal hasil panen yang di dapatkan pada petani dalam satu (1) tahun biasanya hanya dua (2) kali, belum lagi jika saat sedang ingin panen mengalami kegagalan masa panen yang di akibatkan oleh faktor cuaca. Oleh sebab itu, keadaan perempuan tidak bisa hanya mengandalkan dari pendapatan suami yang diperoleh dan tentunya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan yang pas-pasan akan mengakibatkan sebagian masyarakat di Desa Segarajaya hidup dalam garis kemiskinan yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan kelompok pengrajin batik seraci diharapkan dapat menjadi peluang untuk mewadahkan perempuan untuk kreatif dan aktif di sekitar rumah produksi batik seraci.

Selanjutnya, Kelompok pengrajin batik seraci di desa Segarajaya memperdayakan perempuan terutama pada ibu rumah tangga jika dilihat berdasarkan hasil sensus desa Segarajaya pada tahun 2021, presentase jumlah perempuan pada ibu rumah tangga sebesar 22.39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan sebagai ibu rumah tangga masih banyak. Oleh karenanya, hal tersebut mendorong untuk melakukan pemberdayaan kepada perempuan. Kehadiran pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui kelompok pengrajin batik seraci tersebut yang dapat mewadahkan para istri nelayan atau petani untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dan menumbuhkan kemandirian perempuan agar tidak mengandalkan hasil pendapatan kepala keluarga sehingga perempuan mampu berkembang secara optimal dan meningkatkan kemandirian.

Dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir melalui kelompok pengrajin batik seraci di Desa Segarajaya ini telah mendapatkan perhatian, terlihat dari adanya *collaborative governance* antar aktor yang terlibat seperti Pemerintah desa, Diskopukm Kabupaten Bekasi, masyarakat (pengrajin dan pengelola Kelompok Batik Seraci) serta pihak swasta oleh PT. PJB Muara Tawar. Hubungan dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pemberdayaan perempuan

pemerintah desa dan Diskopukm Kabupaten Bekasi berperan sebagai fasilitator, dan masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan, Sedangkan swasta sebagai pendukung dalam pemberdayaan perempuan melalui kelompok Seraci Batik Betawi.

Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan terdapat kendala seperti masih banyak masyarakat yang masih sulit diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kelompok batik seraci, fasilitas dan sarana kurang memadai, dan ibu-ibu rumah tangga yang kurang paham akan membatik. Selain itu, hubungan yang dilakukan oleh para *stakeholder* yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan berupa pelatihan membatik, dimana dalam pelatihan yang dilakukan kepada Kelompok Batik Seraci ini tidak mengalami keberlanjutan karena tidak ada pemantauan yang berlanjut dari *stakeholder* yang terlibat kemudian hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut belum diketahui suatu kegiatan yang berlangsung terwujud atau tidak sedangkan dari masyarakatnya pun belum mengetahui atau memahami dari kegiatan yang dijalankan. Hal ini perlu ditindak lanjuti oleh para *stakeholder* yang bersangkutan untuk melakukan evaluasi dari hasil yang kegiatan yang sudah dijalankan. Kurangnya pengawasan yang dilakukan para *stakeholder* yang terlibat juga merupakan penghambat dalam kolaborasi terkait perkembangan pemberdayaan melalui batik seraci. Hal ini akan berdampak terhadap sumber daya manusia yang akan menurun dan pelaksanaan kolaborasi dalam pemberdayaan perempuan tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan perlu adanya kejelasan terhadap setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Segarajaya, Diskopukm Kabupaten Bekasi, swasta, dan pengelola batik seraci dalam berkolaborasi sehingga hasil yang dijalankan dapat memberikan manfaat pada pengrajin batik seraci di desa Segarajaya serta menumbuhkan kemandirian, keterampilan dan potensi yang ada pada diri mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penelitian ini akan mengkaji mengenai, pelaksanaan kolaborasi antara *stakeholder* yang terlibat. Sehingga pemberdayaan yang dijalankan dan dampak dalam proses pemberdayaan Kelompok Batik Seraci berjalan dengan cepat dan tepat. Dari ketertarikan tersebut

akan dikaji melalui penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Perempuan Di wilayah Pesisir (Studi Kasus Kelompok Pengrajin Batik Seraci Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi)*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan dilatar belakang masalah, maka perlu adanya identifikasi yang mendalam tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan perempuan di Desa Segarajaya?
2. Apasaja Faktor Penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan perempuan di Desa Segarajaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan perempuan di Desa Segarajaya.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan perempuan di Desa Segarajaya.

1.4. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1. Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir dalam menjalankan *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan, dimana sebelumnya jumlah kajian pustaka penelitian yang juga dijadikan rujukan dan penelitian ini terdiri dari sepuluh jurnal diantaranya sebagai berikut :

Jurnal pertama, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Pengrajin Sulaman Bayangan Di Barung-Barung Belantai Kabupaten Pesisir Pantai Selatan”** pada tahun 2018. Ditulis oleh Nor Tiara, dan Yusnanik Bakhtiar. *Journal of Civic Education*, 1(3), 280-288. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemberdayaan perempuan melalui kelompok pengrajin Sulaman Bayangan terbagi menjadi 2 bagian yaitu pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh ketua kelompok pengrajin Sulaman Bayangan dan yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Padang. Pemberdayaan yang dilakukan oleh ketua kelompok pengrajin Sulaman Bayangan yaitu seperti memfasilitasi, sosialisasi, pertemuan rutin dan pelatihan kepada warga yang baru bergabung. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat dari UNP dilakukan melalui metode diskusi, metode pembinaan, metode penyuluhan dan pelatihan menyulam.

Jurnal kedua, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengaruhnya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Nelayan Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)”** pada tahun 2015. Ditulis oleh Amin Kuncoro. *Buletin Ekonomi*, 13(1), 87-96. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, hal ini dikarenakan perempuan pesisir mempunyai aktivitas diluar tugas sehari-hari yaitu menghasilkan berbagai jenis makanan olah yang berbahan dasar hasil laut. Inilah yang selama ini menjadi penggerak ekonomi pedesaan khususnya di pesisir utara Pulau Jawa yaitu didesa Sambiroto Kecamatan Tayu.

Jurnal Ketiga, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Upaya Pemerintah Desa Bangunharjo Dalam Pemberdayaan Perempuan”** pada tahun 2020. Ditulis oleh Nadia Dunnya Jadita dan Chandra Dewi Dewi. *E-CIVICS*, 9(4), 336-346. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 bidang yaitu pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan bidang ekonomi, pengembangan produk ekonomi desa dan kerjasama dengan lembaga terkait pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan yang

dilakukan melalui bidang sosial politik dilakukan melalui pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial politik dan melalui pelestarian kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di desa bangunharjo memiliki hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan.

Jurnal Keempat, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik Srikandi di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”** pada tahun 2021. Ditulis oleh Muhammad Burhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik Srikandi di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara sudah berjalan dengan baik, mulai dari penyadaran, pengkapasitasan, pendayaan dan Capacity building dan Networking. Hasil dari program ini telah memberikan manfaat bagi anggota KUBE Batik Srikandi, mulai dari peningkatan perekonomian dan keterampilan membatik.

Jurnal Kelima, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”** pada tahun 2015. Ditulis oleh Weni Rosdiana. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 3(2), 117-132. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger terdiri dari dimensi kesejahteraan perempuan, dimensi partisipasi, dimensi akses, dimensi penyadaran kritis dan dimensi kontrol. Selain itu, bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger pada pemberdayaan aspek sosial meliputi kegiatan rutin PKK, arisan dan pengajian. Pemberdayaan aspek politik bagi perempuan desa masih kurang karena perempuan desa belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Pemberdayaan perempuan pada aspek psikologis masih kurang dikarenakan perempuan desa masih kurang mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berargumentasi pada forum publik/desa.

Jurnal Keenam, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo)”** pada tahun 2019. Jurnal ini ditulis oleh Nopriono Nopriono dan Suswanta Suswanta Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 1(1), 21-36. Hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk collaborative governance yang dilakukan berjalan secara baik, diukur dari beberapa indikator seperti starting condition, fasilitative leadership, design istitusional dan collaborative process yang sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga mempengaruhi hasil sementara proses kolaborasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi selain dapat meningkatkan produktifitas ikan hasil budidaya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dengan adanya bentuk kolaborasi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran terutama di Desa Hargomulyo.

Jurnal Ketujuh, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo”** pada tahun 2021. Ditulis oleh Putri Fatimah, Abdul Mahsyar, dan Rulinawati Kasmad. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2(1), 294-307. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep Collaborative Governance belum bisa mewujudkan pemberdayaan terhadap Kelompok Tani. Lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga struktur jaringan tidak ada dalam kolaborasi, segi komitmen dari kelompok tani tidak mengetahui cara membangun komitmen, segi membangun rasa saling percaya antara stakeholder masih kurang karena belum mengetahui bagaimana membangun kepercayaan dalam kolaborasi, tata kelola belum baik karena masih adanya perbedaan pendapat antara stakeholder, kemudian dari segi akses terhadap kekuasaan dan akuntabilitas sudah cukup baik, begitupula dari segi berbagi informasi sudah berjalan dengan baik, namun darisegi sumberdaya manusia, tehnik dan keuangan belum memadai.

Jurnal Kedelapan, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu”** pada tahun 2020. Ditulis oleh Cintantya Adhita Dara Kirana, dan Rike Anggun Artisa. Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 68-84. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Adapun dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.

Jurnal Kesembilan, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“*Collaborative Governance* di Kabupaten Kulon Progo melalui Program *One Village One Sister Company* dalam Penanggulangan Kemiskinan”** pada tahun 2015. Jurnal ini ditulis oleh Felix Aglen Ndaru Prasetya. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat sepuluh dimensi dalam *collaborative governance* di Kabupaten Kulon Progo melalui program *one village one sister company* (OVOSC), dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu: partisipan, formalitas, durasi, fokus, stabilitas, tahap, diskresi, alasan Pemerintah melibatkan sektor swasta, upaya Pemerintah mengatasi keterbatasan informasi, dan resiko Pemerintah. Penelitian juga menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program OVOSC merupakan wujud dari semangat gotong royong. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu membentuk Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang beranggotakan seluruh partisipan program OVOSC untuk mempermudah koordinasi.

Jurnal Kesepuluh, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“*COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM KEMANDIRIAN DESA (Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo)”** pada tahun 2018. Ditulis oleh Abdul Fatah Fanani dan Supardi Ibrahim. DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 3(2), 1-18. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung *collaborative governance* dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi

Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu diatas dan juga teori serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang diteliti peneliti, maka terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti dengan yakin bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti. Dari penelitian yang penulis teliti lebih fokus mengenai pelaksanaan *collaborative governance* pada pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir melalui kelompok pengrajin batik seraci yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka isi penelitian skripsi diatas berbeda dengan skripsi penelitian terdahulu, sehingga penulis mengambil judul mengenai "*Collaborative Governance* dalam pemberdayaan Perempuan Di wilayah Pesisir (Studi Kasus Rumah Produksi Pengrajin Batik Seraci Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi). Penelitian ini akan membahas tentang kolaborasi pemerintah dalam pemberdayaan, dimana pemberdayaan yang dilakukan sarannya ialah perempuan khususnya pada ibu-ibu rumah tangga yang menganggur atau kurangnya aktifitas dirumahnya masing-masing dan mengandalkan penghasilan dari suami.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di fakultas ilmu sosial dan politik program studi ilmu pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari pengetahuan baru kepada mahasiswa program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam "45" Bekasi tentang "*Collaborative Governance* dalam pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir (Studi kasus kelompok pengrajin batik seraci Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi)". Selain itu, berbagai temuan penelitian yang ada diharapkan dapat digunakan menjadi saran, masukan, solusi, dan bahan pertimbangan salah satunya memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam

“*collaborative governance* dalam pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir (Studi kasus kelompok pengrajin batik seraci Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi)” Juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang penelitian, dengan harapan semoga hasil peneliti yang dilakukan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa Segara Jaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis beras dalam penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian akan dilakukan peneliti berdasarkan pada aturan sistematika yang telah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dimana pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik signifikansi akademik maupun signifikansi praktis, serta juga sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab II ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Serta Kerangka Pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian. Sehingga peneliti dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu paradigma konstruktivisme. Dan dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Kemudian membahas mengenai sumber dan teknik perolehan data, *goodness and quality research*, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dimana pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian deskripsi data atau gambaran umum penelitian, hasil analisis dan uji data serta pembahasan terkait data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Dimana pada bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran hasil penelitian.